

RINGKASAN

MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH, Progam Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Adat Yang Telah Dikonversi Menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) (Studi Putusan Nomor 59/Pdt/2021/PT.DKI). Komisi Pembimbing, Ketua Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H. dan Anggota Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), terjadi transformasi dalam sistem hukum pertanahan nasional melalui proses konversi hak atas tanah adat menjadi hak-hak baru yang diatur dalam hukum nasional. Proses konversi ini seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, sebagaimana terlihat dalam sengketa kepemilikan tanah antara Lumin Tuningtyas yang berdasarkan girik dan Desyanto yang memiliki Sertifikat Hak Milik di Jakarta Timur, yang berujung pada Putusan Nomor 59/Pdt/2021/PT.DKI. Kasus ini mencerminkan problematika perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah adat yang telah dikonversi, di mana terdapat benturan antara pengakuan terhadap bukti kepemilikan tradisional (girik) dengan sistem sertifikasi modern, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk memperkuat sistem perlindungan hukum yang efektif bagi pemegang hak atas tanah adat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk menganalisis yang pertama pertimbangan hukum hakim terhadap putusan nomor 59/PDT/2021/PT. DKI tentang hak atas tanah adat dengan hak atas tanah barat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik dan yang kedua perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat dengan hak atas tanah barat yang telah dikonversi menjadi sertifikat hak milik. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Spesifikasi penelitian menggunakan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Metode penyajian data dalam bentuk teks naratif. Analisis data menggunakan analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa berdasarkan analisis perkara nomor 59/PDT/2021/PT. DKI, hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Sertifikat Hak Milik (SHM) memiliki kekuatan pembuktian lebih kuat dibandingkan girik sesuai Pasal 19 UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, konversi tanah adat ke hak milik harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah adat yang telah dikonversi mencakup sistem yang komprehensif dengan aspek preventif melalui pendaftaran tanah sistematis dan teknologi informasi terintegrasi, serta aspek represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan asas *nemo plus juris* yang memungkinkan pembatalan sertifikat cacat hukum. Batas waktu gugatan 5 tahun terhadap sertifikat bertujuan melindungi pemegang sertifikat beritikad baik dan mendukung tertib administrasi, namun modernisasi sistem pertanahan pasca-2025 harus tetap mengakomodasi nilai-nilai adat, hak ulayat masyarakat, dan fungsi sosial tanah dalam kerangka sistem hukum pertanahan nasional yang adil dan berkelanjutan sesuai Pasal 3 UUPA.

SUMMARY

MELANIA INDIANA PUTRI FIRMANSYAH, Master of Notary Study Program, Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, Legal Protection of Ownership of Customary Land Rights that have been converted into Certificate of Ownership (SHM) (Study of Decision Number 59/Pdt/2021/PT. DKI). Supervisory Commission, Chairman Prof. Dr. Kartono, S.H., M.H. and Member Dr. Sri Wahyu Handayani, S.H., M.H.

Since the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning the Basic Regulations on Agrarian Principles (UUPA), there has been a transformation in the national land law system through the process of converting rights to customary lands into new rights regulated in national law. This conversion process often raises complex legal problems, as seen in the land ownership dispute between Lumin Tuningtyas who is based on girik and Desyanto who has a Certificate of Ownership in East Jakarta, which led to Decision Number 59/Pdt/2021/PT. DKI. This case reflects the problem of differences in judges' legal considerations and legal protection of the ownership of customary land rights that have been converted, where there is a clash between the recognition of evidence of traditional ownership (girik) and the modern certification system, so that an in-depth analysis is needed to strengthen an effective legal protection system for holders of customary land rights that have been converted into ownership certificates.

The purpose of this study is to analyze the first legal considerations of judges on decision number 59/PDT/2021/PT. Jakarta on the right to customary land with rights to western land that has been converted into property rights and the second is legal protection for holders of customary land rights with rights to western land that has been converted into property rights certificates. The research method uses normative juridical with legislative, case, and conceptual approaches. The research specification uses descriptive analysis. The data source used in this study is secondary data. The data collection method uses literature studies. The method of presenting data in the form of narrative text. Data analysis uses qualitative normative analysis.

The results of the research obtained are that based on the analysis of case number 59/PDT/2021/PT. In Jakarta, the judge considered that although the Certificate of Property Rights (SHM) has stronger evidentiary power than girik according to Article 19 of the UUPA and Government Regulation No. 24 of 1997, the conversion of customary land to property rights must still pay attention to the balance between legal certainty and social justice as mandated by the 1945 Constitution. Legal protection for holders of customary land rights that have been converted includes a comprehensive system with preventive aspects through systematic land registration and integrated information technology, as well as repressive aspects through dispute resolution mechanisms and the application of the nemo plus juris principle that allows the cancellation of legal defect certificates. The 5-year lawsuit deadline against the certificate aims to protect certificate holders in good faith and support administrative order, but the modernization of the land system post-2025 must still accommodate customary values, customary rights of the community, and the social function of land within the framework of a fair and sustainable national land legal system in accordance with Article 3 of the UUPA.